

CASCADING KINERJA HASIL PENYELARASAN TAHUN 2024 BPBD KABUPATEN BANJARNEGARA																																							
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Target				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Target				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B	B	B	BB	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja BPBD agar efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	60,00	69,65	70,00	71,00	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase	100%	100%	100%	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja OPD yang akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja OPD yang akuntabel.	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5	5	
	Meningkatkan kualitas layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34	85,00	85,34	86,00	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM	Angka	80,00	84,00	84,25	85,00	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase	100%	100%	100%	100%	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26	45	45	45	
																															Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	7	7	7	
																															Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	
																							Terlaksananya administrasi perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	28	32	60	
																							Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	13	13	
																															Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	
																							Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	10	10	10	
																							Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	
																															Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	
																							Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persenatase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	
																															Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	24	24	24	
																															Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10	
																															Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	4	3	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Target				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Target				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET											
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026								
				5	6	7	8				9	10	11	12					13	14	15	16					17	18	19	20					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persenatse Desa Tangguh Bencana	Persentase	7,55%	8,96%	10,36%	11,76%	Meningkatnya ketangguhan masyarakat Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	7,55%	8,96%	10,36%	11,76%	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Persenatse Cakupan Penanggulang an Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya Layanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persenatse Layanan Informasi Rawan Bencana	Persenatse	100%	100%	100%	100%	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	0	0	0	0							
				100%	100%	100%	100%		Persentase warga negara memperoleh layanan kedaruratan bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%																Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1000	1000	1000	1000	1000								
				100%	100%	100%	100%		Persentase layanan pasca bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%									Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persenatse Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persenatse	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Penguatan Kapasitas Kawasan yang Ditingkatkan apasitarnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	10	10	10	10	10							
																														Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	60	60	60	60	60								
																														Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1	1	1								
																														Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	250	250	250	250	250								
																														Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	0	0	0	0								
																														Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Perlindungan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	50	50	50	50	50								
																														Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	200	200	200	200	200								
																														Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	12	12	12	12								
																														Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persenatse	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Laporan	1	1	1	1	1

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Target				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Target				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40
																															Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	1	1
																															Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievaluasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	100	100	100
																															Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Orang	100	100	100	100
																															Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit Penanganan Awal untuk KLB yang Ditanggarkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Respon Cepat Pandemi/ Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	1	1	1
																															Terlaksananya Pengarahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/ Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Laporan	12	12	12	12
																							Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	2	2	2
																							Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	10	10	10	10								
																							Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	3	3	3								

Banjarnegara, 10 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

ARIS SUDARYANTO, S.Pd., MM
Zetina Utina Muda
NIP. 49640826 198405 1 007